

# PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KAS DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

**Isna Puluhulawa**

*isnapuluhulawa@yahoo.com*

*(Mahasiswa Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako)*

## **Abstract**

*This research aims to know and analyze regional financial management consisting of planning, implementation, administration, report, responsibility, and controlling on public service simultaneously and partially. This is a descriptive verificative research using multiple linear regression as an analysis tool. This research involves 75 treasurers at regional work unit (SKPD) in Central Sulawesi Province. The results show that simultaneously and partially regional financial management consisting of planning, implementation, administration, report, responsibility, and controlling perform positive and significant effect on public service at Regional Cash Office. Central Sulawesi Province. Based on partial effect test in indicates that controlling is the dominant variable effecting public service following by responsibility (0,011), report (0,034), implementation (0,042), planning (0,043) and administration (0,044) respectively.*

**Keywords:** *regional financial management, publik service*

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatасusahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah penting dalam pengelolaan. Dengan pengawasan yang baik maka alokasi anggaran publik yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat di peruntukan untuk kepentingan publik. Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas publik, pemerintah daerah perlu membuat laporan keuangan yang disampaikan kepada publik dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Keuangan Daerah yang dimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, peraturan tersebut menyangkut bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Dilihat

dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di Indonesia khususnya di Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih memiliki beberapa kelemahan (Syukri, 2009:17), antara lain:

- 1) Kurang *responsive*
- 2) Kurang informatif
- 3) Kurang *acesible*
- 4) Kurang koordinasi
- 5) Terlalu birokratis
- 6) Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat
- 7) In efisien

Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak ada kepastian jangka waktu penyelesaian, biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak transparan, dan sikap petugas yang kurang *responsive*, sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap pemerintah. Berdasarkan pengamatan di lapangan bahwa pelayanan publik yang dilakukan oleh para pegawai dalam lingkungan birokrasi pada Kantor Kas Daerah mendapat keluhan dari

para bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah. Keluhan tersebut lebih berkaitan pada faktor pelayanan administrasi yang amat berliku-liku dan jenjang kepengurusan dari meja ke meja, yang sebetulnya bisa diselesaikan secara cepat dan tanggap. Hal ini yang membuat tidak efektif dalam pengelolaan keuangan daerah dalam fungsi pelayanan kepada bendahara maupun para pimpinan-pimpinan dari lembaga-lembaga atau organisasi perusahaan yang berkepentingan.

Bertolak dari uraian di atas, maka penulis termotivasi untuk melaksanakan penelitian yang diwujudkan dalam kerangka tulisan dengan judul ***“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah”***

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sub variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Apakah perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Apakah pelaksanaan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Apakah penatausahaan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 5) Apakah pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 6) Apakah pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 7) Apakah pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada

Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) Pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sub variabel perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara simultan berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 2) Perencanaan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 3) Pelaksanaan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 4) Penatausahaan secara parsial berpengaruh terhadap Pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 5) Pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 6) Pertanggungjawaban secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; 7) Pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu menguraikan tentang pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Kas Daerah. Selain itu juga menggunakan metode penelitian verifikatif yaitu penelitian yang berupaya menguji jawaban masalah, pemikiran yang sebenarnya bersifat sementara (hipotesis). Demikian pula pada data mengenai hubungan antara variabel dalam penelitian ini, juga akan dianalisis dengan menggunakan metode verikatif melalui bantuan peralatan statistik yang relevan dengan data tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah

populasi sebanyak 75 SKPD. Berikut daftar nama SKPD Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi populasi dalam penelitian ini.

**Tabel 1.**  
**Daftar Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

No	Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.	Dinas Pendidikan
2.	UPTD PKB PNFI
3.	UPTD Teknologi dan Komunikasi, Infodik
4.	UPTD Pendidikan
5.	Dinas Kesehatan
6.	UPTD Balai Laboratorium Kesehatan
7.	UPTD Balai Pelatihan Kesehatan
8.	UPTD Balai Promosi Kesehatan
9.	UPTD Balai Surveilans Data dan Informasi Kesehatan
10.	Dinas Pekerjaan Umum
11.	UPT SDA Wilayah I & II
12.	UPT Rehab Jalan dan Jembatan I & II
13.	Badan Lingkungan Hidup Daerah
14.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Daerah
15.	Dinas Sosial
16.	UPTD Panti Sosial Bina Remaja Karya Wanita Palu
17.	UPTD Panti Sosial Tresna Wedha Madago Tentena
18.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
19.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20.	UPTD Museum
21.	UPTD Taman Budaya
22.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23.	Dinas Pendapatan Daerah
24.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
25.	Inspektorat Daerah
26.	Kantor Kas Daerah
27.	Perwakilan Pemda Jakarta
28.	Kantor Polisi Pamong Praja
29.	KORPRI
30.	Dinas Pertanian
31.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
32.	UPT Bibit Ternak
33.	UPT Bibit Veteriner
34.	Dinas Kehutanan
35.	RSUD Undata
36.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
37.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

38.	UPT UKM - BLK
39.	UPT BPT
40.	UPT P2TKI
41.	UPT P2D
42.	Badan Promosi Penanaman Modal Daerah
43.	Sekretariat DPRD
44.	Badan Ketahanan Pangan
45.	UPTD Cadangan Pangan
46.	Badan Pemberdayaan Masyarakat
47.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
48.	Dinas Perkebunan
49.	UPT Proteksi
50.	UPT Mutu & Sertifikasi Benih
51.	BAKORLUH
52.	Dinas Perikanan dan Kelautan
53.	RSD Madani
54.	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
55.	Badan Kepegawaian dan Diklat
56.	Badan Perpustakaan dan Arsip Dokumen Daerah
57.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
58.	Dinas Pertambangan dan Energi
59.	UPTD Perbenihan
60.	UPTD LPPMHP
61.	UPTD Pelabuhan
62.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
63.	Badan Narkotik
64.	Dinas Pemuda dan Olahraga
65.	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
66.	TU Pimpinan
67.	Biro Keuangan
68.	Biro Hukum dan Perundang- undangan
69.	Biro Perlengkapan Umum dan Asset
70.	Biro Organisasi
71.	Biro Adm Pembangunan dan SDA
72.	Biro Adm Kesra dan Kemasyarakatan
73.	Biro Adm Perekonomian
74.	Biro Adm Pemerintahan Umum
75.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Sumber: Sekertaris Daerah Provinsi 2012

### Uji Kesahihan atau Validitas (*Validity*)

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pertanyaan yang ada dalam kuisisioner atau pernyataan, suatu pernyataan dianggap sah

jika pernyataan tersebut mampu mengungkapkan apa yang diukur seperti yang dikemukakan Sugiyono (2002:267):

**Tabel 2.**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel/No. Item Pernyataan	Corrected item-total correlation	Standar Korelasi	Keterangan
X1.1	,710	0,30	Valid
X1.2	,580	0,30	Valid
X1.3	,467	0,30	Valid
X2.1	,481	0,30	Valid
X2.2	,416	0,30	Valid
X2.3	,430	0,30	Valid
X3.1	,497	0,30	Valid
X3.2	,636	0,30	Valid
X3.3	,494	0,30	Valid
X4.1	,471	0,30	Valid
X4.2	,571	0,30	Valid
X4.3	,422	0,30	Valid
X5.1	,434	0,30	Valid
X5.2	,548	0,30	Valid
X5.3	,395	0,30	Valid
X6.1	,556	0,30	Valid
X6.2	,600	0,30	Valid
X6.3	,335	0,30	Valid
Y1.1	,483	0,30	Valid
Y1.2	,538	0,30	Valid
Y1.3	,751	0,30	Valid
Y1.4	,570	0,30	Valid
Y1.5	,340	0,30	Valid
Y1.6	,405	0,30	Valid
Y1.7	,681	0,30	Valid
Y1.8	,770	0,30	Valid
Y1.9	,751	0,30	Valid
Y1.10	,476	0,30	Valid
Y1.11	,323	0,30	Valid
Y1.12	,316	0,30	Valid
Y1.13	,317	0,30	Valid

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 5)

Berdasarkan data tersebut diatas, pengujian statistik terhadap variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pelayanan publik secara keseluruhan item pernyataan dinyatakan valid.

**Uji keandalan atau reliabilitas (reliability)**

Menurut Sugiono (2002:110) menyatakan instrument yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *alpha Cronbach* untuk menentukan apakah setiap instrumen reliabel atau tidak. Pengujian statistik terhadap variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pelayanan publik secara keseluruhan item pernyataan dinyatakan reliabel sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

**Tabel 3.**  
**Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian**

Variabel	Nilai Alpha ( $\alpha$ )	Keterangan
Perencanaan (X <sub>1</sub> )	,752	Reliabel
Penatausahaan (X <sub>2</sub> )	,622	Reliabel
Pelaksanaan (X <sub>3</sub> )	,716	Reliabel
Pelaporan (X <sub>4</sub> )	,664	Reliabel
Pertanggungjawaban (X <sub>5</sub> )	,640	Reliabel
Pengawasan (X <sub>6</sub> )	,677	Reliabel
Pelayanan Publik (Y)	,853	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah (Lampiran 5)

Berdasarkan data tersebut diatas, pengujian statistik terhadap variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, dan pelayanan publik secara keseluruhan item pernyataan dinyatakan reliabel.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Deskriptif Kuantitatif**

Data penelitian berdasarkan kuesioner dan berdasarkan jawaban yang diperoleh, dimana terdiri dari lamanya masa kerja, jabatan, usia dan jenis kelamin. Banyaknya responden yang diteliti oleh peneliti adalah sebanyak satu Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 1 (satu) orang yang menduduki jabatan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Banyak responden yang didapatkan dilapangan responden sebanyak 75 orang

dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebanyak 75 Dinas yang terdapat pada Propinsi Sulawesi Tengah dan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

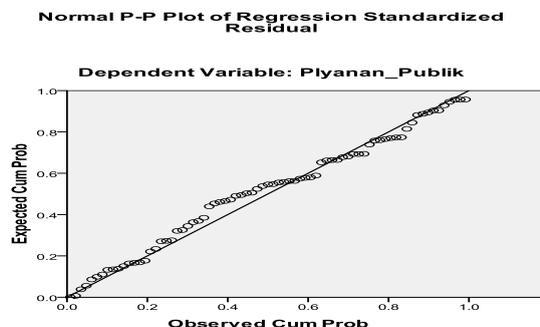
**Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan adalah:

1. Jika data tersebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika menyebar jauh dari diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan hasil pengolahan regresi berganda, berikut uji normalitas data dapat di lihat pada gambar di bawah ini yaitu sebagai berikut:



**Gambar 1. Grafik Normal P-Plot**

Gambar 1 Grafik Normal P – Plot di atas menunjukkan bahwa plot yang terdapat dalam gambar mengikuti garis diagonal. Hal ini menggambarkan bahwa pengujian dari penelitian tersebut telah memenuhi uji normalitas data.

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dapat dilaksanakan menggunakan model regresi dan melakukan

uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai Variance Inflation Factors (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinieritas pada tabel berikut:

**Tabel 4.**  
**Hasil Pengujian Multikolinieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.581	.239		2.430	.018		
Perencanaan	.096	.046	.146	2.064	.043	.663	1.509
Pelaksanaan	.104	.050	.140	2.069	.042	.717	1.395
Penatausahaan	.106	.052	.144	2.056	.044	.672	1.489
Pelaporan	.149	.069	.176	2.169	.034	.501	1.997
Pertanggungjawaban	.171	.065	.214	2.619	.011	.496	2.017
Pengawasan	.260	.054	.390	4.772	.000	.493	2.029

Sumber: Data Diolah, 2012

Berdasarkan Tabel 4 di atas, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai VIF di bawah 10, yaitu variabel Perencanaan sebagai (X<sub>1</sub>) nilai VIF menunjukkan angka sebesar 1.509, Pelaksanaan sebagai (X<sub>2</sub>) nilai VIF sebesar 1.395, Penatausahaan sebagai (X<sub>3</sub>) nilai VIF sebesar 1.489, Pelaporan sebagai (X<sub>4</sub>) nilai VIF sebesar 1.997, Pertanggungjawaban sebagai (X<sub>5</sub>) nilai VIF sebesar 2.017, Pengawasan sebagai (X<sub>6</sub>) nilai VIF sebesar 2.029. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk dari hasil penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam regresi.

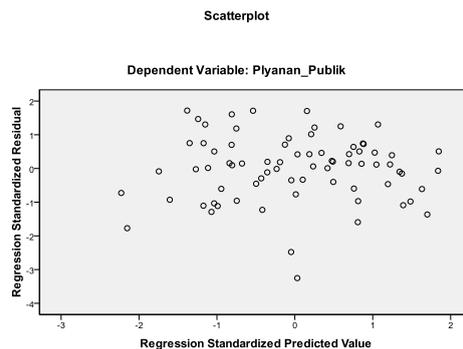
3. Uji Heterokedastisitas

Santoso (2002) menyatakan bahwa untuk melihat ada tidaknya

*heteroskedastisitas* pada grafik adalah dengan melihat pola sebaran titik-titik (data):

- a. Jika titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu yang teratur seperti ( bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka terdapat situasi *heteroskedastisitas*
- b. Jika tidak terdapat pola yang jelas pada sebaran titik-titik baik diatas maupun dibawah angka nol maka tidak terjadi *heteroskedastisitas*.

Di dalam pengujian heteroskedasitas pada penelitian ini didasarkan pada Scatterplot. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik Scatterplot sebagai berikut:



**Gambar 2. Grafik Scaterplot**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Hasil estimasi model pengelolaan keuangan daerah (dengan sub variabel Perencanaan (X<sub>1</sub>), sub variabel Pelaksanaan (X<sub>2</sub>), sub variabel Penatausahaan (X<sub>3</sub>), sub variabel Pelaporan (X<sub>4</sub>), sub variabel Pertanggungjawaban (X<sub>5</sub>), dan sub variabel Pengawasan (X<sub>6</sub>)) terhadap Pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y) yang diperoleh dari output regresi, maka digunakan analisis

regresi berganda dengan cara menguji makna dari koefisien regresinya. Berikut hasil pengujian regresi dapat di lihat pada uraian di bawah ini :

**Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 5.  
Hasil Uji Simultan (Uji F)**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	15.043	6	2.507	39.182	.000 <sup>a</sup>
	Residual	4.351	68	.064		
	Total	19.395	74			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Perencanaan, Penatausahaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban

Sumber: Data Diolah, 2012

Tabel 5 menunjukkan hasil uji simultan (uji F), nilai F menunjukkan sebesar 39.182 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar 0.00, dimana 0.00 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sub variabel perencanaan (X<sub>1</sub>), pelaksanaan (X<sub>2</sub>), penatausahaan (X<sub>3</sub>), pelaporan (X<sub>4</sub>), pertanggungjawaban (X<sub>5</sub>), dan pengawasan (X<sub>6</sub>) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y).

**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing - masing variabel yang dimasukkan dalam model, apakah mempunyai pengaruh signifikan parsial terhadap variabel dependen. Untuk menentukan masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung digunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut:

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.581	.239		2.430	.018
Perencanaan	.096	.046	.146	2.064	.043
Pelaksanaan	.104	.050	.140	2.069	.042
Penatausahaan	.106	.052	.144	2.056	.044
Pelaporan	.149	.069	.176	2.169	.034
Pertanggungjawaban	.171	.065	.214	2.619	.011
Pengawasan	.260	.054	.390	4.772	.000

Sumber: Data Diolah, 2012

Dari hasil pengujian regresi menunjukkan hasil uji parsial untuk masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Perencanaan sebagai ( $X_1$ ) menunjukkan  $t_{hitung}$  sebesar 2.064 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.043, dimana  $0.043 < 0.05$ , menunjukkan secara parsial bahwa Perencanaan sebagai ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y).
2. Variabel Pelaksanaan sebagai ( $X_2$ ) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.069 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.042, dimana  $0.042 < 0.05$  menunjukkan secara parsial bahwa Pelaksanaan sebagai ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y).
3. Variabel Penatausahaan sebagai ( $X_3$ ) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.056 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.044, dimana  $0.044 < 0.05$  menunjukkan secara parsial bahwa Penatausahaan sebagai ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y).
4. Variabel Pelaporan sebagai ( $X_4$ ) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.169

dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.034, dimana  $0.034 < 0.05$  menunjukkan secara parsial bahwa Pelaporan sebagai ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y).

5. Variabel Pertanggungjawaban sebagai ( $X_5$ ) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.619 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.011, dimana  $0.011 < 0.05$  menunjukkan secara parsial bahwa Pertanggungjawaban sebagai ( $X_5$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y).
6. Variabel Pengawasan sebagai ( $X_6$ ) menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 4.772 dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0.011, dimana  $0.011 < 0.05$  menunjukkan secara parsial bahwa Pengawasan sebagai ( $X_6$ ) berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y).

Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel 4.6 di atas maka dapat dibentuk model estimasi dengan menulis persamaan yaitu sebagai berikut:

**Pelayanan Publik = 0.581 + 0,146 (X<sub>1</sub>) + 0,140 (X<sub>2</sub>) + 0.144 (X<sub>3</sub>) + 0.176 (X<sub>4</sub>) + 0. 214 (X<sub>5</sub>)**

Adapun asumsi dari hasil model estimasi persamaan dalam regresi berganda yaitu sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0.581 menyatakan bahwa jika variabel independent dianggap konstan, maka pelayanan publik sebesar 0.581.
2. Nilai koefisien regresi variabel perencanaan sebagai (X<sub>1</sub>) sebesar 0.146 berpengaruh positif pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y), sehingga jika Perencanaan meningkat sebesar 1 % maka Pelayanan Publik meningkat sebesar 0.146.
3. Nilai koefisien regresi variabel pelaksanaan sebagai (X<sub>2</sub>) sebesar 0.140 berpengaruh positif terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y), sehingga jika Perencanaan meningkat sebesar 1 % maka pelayanan publik meningkat sebesar 0.140.
4. Nilai koefisien regresi variabel penatausahaan sebagai (X<sub>3</sub>) sebesar 0.144 berpengaruh positif terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y), sehingga jika Perencanaan meningkat sebesar 1 % maka Pelayanan Publik meningkat sebesar 0.144.
5. Nilai koefisien regresi variabel pelaporan sebagai (X<sub>4</sub>) sebesar 0.176 berpengaruh positif terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y), sehingga jika perencanaan meningkat sebesar 1 % maka pelayanan publik meningkat sebesar 0.176.
6. Nilai koefisien regresi variabel pertanggungjawaban (X<sub>5</sub>) sebesar 0.214 berpengaruh positif terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y), sehingga jika perencanaan meningkat sebesar 1 % maka pelayanan publik meningkat sebesar 0.216.
7. Nilai koefisien regresi variabel pengawasan (X<sub>6</sub>) sebesar 0.390 berpengaruh positif terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai (Y), sehingga jika perencanaan meningkat sebesar 1 % maka pelayanan publik meningkat sebesar 0.390.

**Koefisien Determinasi**

Hasil nilai *adjust R-square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya Pelayanan Publik pada Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya. Berikut tabel untuk koefisien determinasi di bawah ini:

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.881 <sup>a</sup>	.776	.756	.25296	1.765

Sumber: Data Diolah, 2012

Tabel 7 adalah Tabel hasil uji koefisien determinasi yang dimana menunjukkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0.881 bahwa pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan mempunyai pengaruh terhadap

pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sedangkan selebihnya sebesar 12 % dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar daripada penelitian yang dilakukan peneliti tersebut.

**Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya tugas pada Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah adalah melayani bagaimana pelaporan keuangan yang terjadi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Propinsi Sulawesi Tengah yang menangani pelaporan keuangan tersebut adalah bendahara. Bendahara melakukan pelaporan keuangan pada Kantor Kas Daerah yang mencakup bagaimana target penetapan penerimaan Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain Yang Sah, serta penggunaan dana yang dilakukan khususnya dalam melakukan belanja rutin maupun belanja tidak rutin. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Cristianti (2010), bahwa dampak dan pelaksanaan pedoman Pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

1. Secara langsung akan mempengaruhi pelayanan administrasi keuangan;
2. Dengan diterapkannya pedoman tersebut maka diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat atau penyedia barang/jasa.
3. Pemerintah daerah mampu menyusun anggaran belanja rutin pada tanggal tertentu sebelum tahun anggaran. Sehingga untuk pelaksanaan berbagai kegiatan tahun yang akan datang dapat ditentukan dan ditetapkan alokasi dananya;
4. Adanya rasa tanggung jawab dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan visi dan misi bagian keuangan;

5. Motivasi pimpinan dalam menunjang kinerja pengelola administrasi keuangan.
6. Adanya mekanisme pengelolaan yang baku dari tahap perencanaan pengelolaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan.

**Pengaruh Perencanaan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa perencanaan yang merupakan sub variabel independen yaitu sebagai ( $X_1$ ) dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya perencanaan merupakan salah satu komponen dari pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah dikarenakan Pemerintah Daerah khususnya yang memegang jabatan seperti Bendaharan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melakukan kegiatan hendaknya melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan yang dimaksud adalah rencana strategis (renstra), renstra yang dimaksud adalah kegiatan yang akan dilakukan selama satu tahun berjalan, kegiatan berupa belanja daerah yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan sumber penerimaan yang berupa pendapatan Daerah harus jelas berapa penentuan target yang akan dilakukan.

Dari aspek perencanaan, Daerah sangat membutuhkan aparat daerah (baik eksekutif maupun legislatif) yang berkualitas tinggi, bervisi strategis dan mampu berpikir strategis, serta memiliki moral yang baik sehingga dapat mengelola pembangunan daerah dengan baik. Partisipasi aktif dari semua elemen yang ada di daerah sangat dibutuhkan agar perencanaan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan daerah dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi daerah (Mardiasmo, 2002).

### **Pengaruh Pelaksanaan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kegiatan setelah melakukan perencanaan atas kegiatan yang akan dilakukan maka dilanjutkan dengan suatu pelaksanaan atas kegiatan yang telah diuraikan baik jangka pendek maupun jangka panjang yang dilakukan oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan yang dimaksud adalah menguraikan pekerjaan yang akan diprioritaskan terlebih dahulu, pegawai mampu menganalisis mana kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah agar waktu dan biaya dapat digunakan seefisien mungkin. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah khususnya Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah menunjukkan pelaksanaan sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga hasil yang dicapai dengan adanya pedoman tersebut adalah pelaksanaan kegiatan sudah efektif terjadi, selain itu pelaksanaan realisasi yang terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah sudah optimal penggunaan dana ataupun waktu.

### **Pengaruh Penatausahaan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Dari hasil regresi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Penatausahaan berpengaruh positif terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Hasil kuisisioner yang telah diedarkan menunjukkan bahwa penatausahaan yang terjadi pada Bendahara Satuan Kerja Perangkat mampu dilakukan dengan baik dan

setiap bendahara sudah mampu memahami dari pengelolaan keuangan khususnya penatausahaan, serta pegawai bendahara juga mampu menyesuaikan diri dengan adanya regulasi atau perubahan sistim yang terjadi sesuai dengan peraturan daerah yang sellau berubah-ubah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

### **Pengaruh Pelaporan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa pelaporan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pelaporan keuangan adalah salah satu komponen dari pengelolaan keuangan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam melakukan pelaporan keuangan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah mampu menyediakan informasi berupa laporan keuangan baik yang dibutuhkan Pemerintah Daerah khususnya dalam menentukan kebijakan. Laporan keuangan hanyalah salah satu medium dalam penyampaian informasi. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

### **Pengaruh Pertanggungjawaban Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban menunjukkan secara parsial berpengaruh

positif terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan salah satu komponen dari pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pertanggungjawaban sangat penting dalam pengelolaan keuangan karena merupakan salah satu tolak ukur atas kegiatan yang dilakukan pada Instansi pemerintah daerah. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah mampu menyelesaikan pekerjaan pengguna anggaran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, selain itu pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban sudah sangat efektif yang terjadi sehingga pelaporan pada Kas Daerah juga menunjukkan hasil yang memuaskan dan menunjukkan pelayanan yang baik diberikan Kas Daerah pada Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ditetapkan berdasarkan standar atau sistem akuntansi yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan karena selain dapat memperlancar audit atau penilaian, baik secara internal maupun eksternal, dapat pula menjamin ketercapaian mutu dalam pengelolaan keuangan.

### **Pengaruh Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan hasil regresi yang di dapatkan bahwa Pengawasan secara parsial berpengaruh positif terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Kas Daerah Propinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan salah satu komponen akhir dari pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan sangat diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dalam keuangan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis. Memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandat, visi, misi, tujuan serta target-target operasi organisasi.

Mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tiap instansi yang akan dijadikan parameter penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab 4, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari sub variabel perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik Pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
2. Perencanaan sebagai ( $X_1$ ) secara positif berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Pelaksanaan sebagai ( $X_2$ ) secara positif berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Penatausahaan sebagai ( $X_3$ ) secara positif berpengaruh terhadap signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pelaporan sebagai ( $X_4$ ) secara positif berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Pertanggungjawaban sebagai ( $X_5$ ) secara positif berpengaruh signifikan terhadap pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pengawasan sebagai ( $X_6$ ) secara positif berpengaruh signifikan terhadap

pelayanan publik pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

### Rekomendasi

Dari hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang ada pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, sebagian besar responden sudah mengetahui dengan baik dan mengikuti prosedur pengawasan yang ada sehingga aspek ini perlu dipertahankan.
2. Pada aspek pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dapat menjamin mutu ketercapaian program kegiatan, sedangkan ketidaksesuaian atau perubahan diperlukan penjelasan, agar dapat diketahui kendala pelaksanaan sebagai pengalaman (*project experiences*) dalam penyusunan perencanaan keuangan periode berikutnya.
3. Untuk aspek pelaporan pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu dijadwalkan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi.
4. Pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Penempatan pegawai harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki atau latar belakang ilmu pendidikan guna menunjang dan mencapai efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
5. Pada aspek perencanaan pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditemukan bahwa belum difungsikannya tenaga perencana, guna menunjang tercapainya suatu kualitas perencanaan yang baik sehingga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebaiknya

mendayagunakannya dengan mengangkat tenaga fungsional perencana. Dengan keikutsertaan aparatur dalam pendidikan perencanaan, akan diperoleh aparatur yang berkualitas dalam bidang perencanaan, yang tidak saja dalam hal keahlian dan keterampilan perencana namun juga pada kompetensi sesuai bidang tugasnya.

6. Pada aspek penatausahaan pengelolaan keuangan daerah pada Kantor Kas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Perlunya pelatihan teknis mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah bagi pengelola penatausahaan keuangan yang dilakukan secara berkesinambungan dengan metode yang lebih tepat dan efektif atau bimbingan teknis mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan pengelolaan penatausahaan keuangan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan kompetensi dari pengelola penatausahaan keuangan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian artikel ini banyak mendapat bantuan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak, olehnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada bapak Prof Dr Djayanai Nurdin, SE, M. Si dan ibu Wahyuningsih, SE, M.Sc, Ph. D yang dengan sabar mengarahkan serta membimbing penulis dari awal sampai akhir penulisan artikel ini.

### DAFTAR RUJUKAN

- Cristianti, Zenny. 2010. *Efektivitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala*. Tesis. Palu: Program Pascasarjana, Universitas Tadulako.
- Ghozali, Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Press.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alberta.  
Syukri, Agus Fanar. 2009. *Standar Pelayanan Publik Pemda* (Berdasarkan ISO 9001/IWA-4). Bantul: Kreasi Wacana.  
Santoso, Singgih. 2002. *SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.